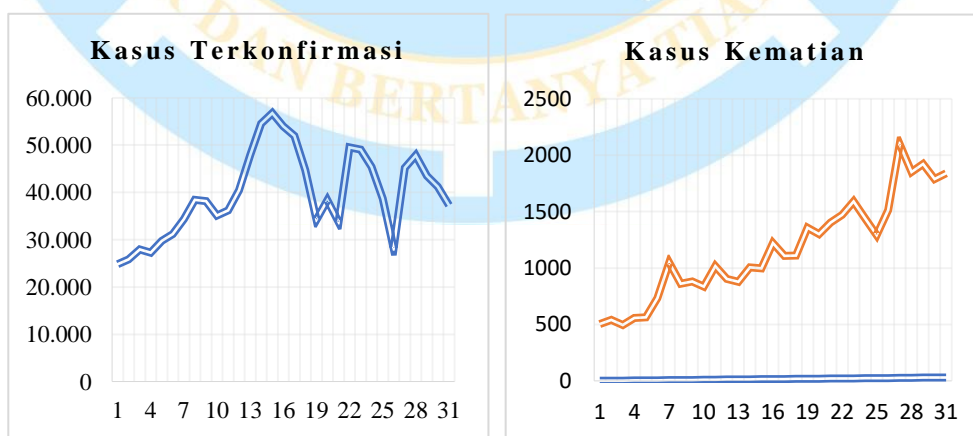


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 lalu, dunia sempat gempar dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* atau yang disebut dengan Covid-19. Dilansir dari laman *World Health Organization* (WHO) Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus ini dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia mulai dari gejala ringan, sedang, hingga berat yang dapat menular melalui partikel cairan seperti batuk dan pilek. Pada kasus berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian.

Jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus bertambah, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Kemudian pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic*.



Sumber: <https://covid19.go.id/>

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa kasus konfirmasi tertinggi tercatat pada 15 Juli 2021 sebesar 56.757 kasus. Sedangkan angka kematian tertinggi akibat Covid-19, tercatat pada 27 Juli 2021 sebesar 2.069 korban jiwa. Adanya penambahan kasus tersebut, membuat Indonesia berada di urutan pertama dengan penyumbang kasus kematian Covid-19 tertinggi di dunia pada bulan Juli 2021 (Bramasta, 2021). Selain memakan korban jiwa, pandemi Covid-19 juga telah menimbulkan dampak yang sangat luar biasa signifikan bagi seluruh sektor kehidupan, terutama pada sektor ekonomi.

Salah satu upaya Pemerintah dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air ialah dengan kebijakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down*, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk: mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Pemerintah Pusat dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19 melibatkan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Bantuan vaksin dari Pemerintah Pusat diberikan secara gratis/tidak dipungut biaya. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menargetkan pelaksanaan vaksinasi tercapai 70 persen di akhir Juli 2021.

Menindaklanjuti Permenkes No. 18 Tahun 2021 tersebut, Pemerintah Kota Batam menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Batam. Batam merupakan salah satu kota di Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 1.196.396 jiwa. Berikut adalah data jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kepulauan Riau Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Anambas	47.402
Batam	1.196.396
Bintan	159.518
Karimun	253.457
Lingga	98.633
Natuna	81.495
Tanjungpinang	227.663
Kepulauan Riau	2.064.564

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Berikut ini merupakan data terkait dengan sasaran dan capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Batam hingga 24 Juli 2021 (Kaputra, 2021):

Tabel 1.2 Sasaran dan Capaian Vaksinasi Hingga 24 Juli 2021

Usia	Sasaran	Capaian
12-17 Tahun	117.866 jiwa	35.782 jiwa
> 18 Tahun	789.451 jiwa	490.055 jiwa

Sumber: Tribun Batam, (telah diolah kembali).

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian vaksinasi di Kota Batam belum mencapai dari target yang ditetapkan, untuk usia 12-17 tahun sebanyak 35.782 jiwa atau setara dengan 30,36 persen. Kemudian capaian vaksinasi usia 18 tahun ke atas sebanyak 490.055 jiwa atau setara dengan 62,08 persen. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam pada realitanya ditemukan kendala, yakni sempat terhenti sementara dikarenakan keterbatasan pasokan vaksin yang di distribusikan Pemerintah Provinsi.

Dalam postingan akun resmi Instagram (media sosial), beberapa lokasi penyelenggara vaksin menginformasikan bahwasannya jadwal vaksin ditunda sementara sambil menunggu ketersediaan vaksin, diantaranya: Puskesmas Botania pada tanggal 05 dan 24 Juli 2021, Puskesmas Lubuk Baja pada tanggal 23 Juli 2021, dan Apindo Kepri pada tanggal 17,23 dan 28 Juli 2021. Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwasannya pelaksanaan vaksinasi saat ini belum bisa dilakukan secara konsisten setiap hari, dikarenakan ketersediaan stok vaksin belum sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat tingginya antusias masyarakat Kota

Batam untuk mendapatkan vaksin, Walikota Batam, Muhammad Rudi, juga meminta tambahan satu juta dosis vaksin Covid-19 demi mencapai target sasaran (Batampos.co.id, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (RB M. Akbar T. A. P, Diaz Virdani, Kiki Darma Kasih, Lukman Arif, 2021) yang mendeskripsikan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19, ditemui faktor yang mendukung dan penghambat serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III berdasarkan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan, yaitu: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan d) struktur birokrasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya pada realitanya menemukan sejumlah masalah antara lain realisasi vaksin kepada sasaran jauh dari target yang ditetapkan, keengganan calon penerima vaksin menginformasikan penyebab ketidakhadirannya kepada petugas fasilitas kesehatan, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai jadwal yang ditetapkan. Penyebab lainnya yang tak kalah penting adalah kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara, karena beberapa diantaranya data yang masuk terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas, bahkan beberapa lainnya ditemukan telah melakukan vaksinasi ditempat lain.

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Arimurti Kriswibowo, Josephine Karina Putri Prameswari, Alif Galih Baskoro, 2021) untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan publik terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dibuat oleh pemerintah agar percepatan penanganan Covid-19 tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat dari kelima cluster tersebut terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 masuk dalam kategori percaya, yang artinya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 juga tinggi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan usaha pembangunan relasi dengan masyarakat sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Dari beberapa uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti memilih objek penelitian implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam karena dalam pelaksanaannya ditemukan kendala. Padahal vaksinasi ini menjadi salah satu cara untuk memulihkan kembali sektor pariwisata yang ada di Kota Batam. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan metode kualitatif deskriptif, yang didukung oleh teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan pada enam indikator, yaitu : a) standar dan sasaran kebijakan, b) sumberdaya, c) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, d) karakteristik badan-

badan pelaksana, e) kecenderungan pelaksana, dan f) kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Penulis memilih menggunakan teori Van Meter dan Van Horn karena indikator yang ditawarkan dianggap paling tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan peneliti terkait implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam. Alasan lainnya adalah karena kebijakan vaksinasi Covid-19 ini merupakan kebijakan yang bersifat *top-down*, dimana kebijakan ini tersentralisasi (terpusat) dari Pemerintah Pusat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gejala-gejala masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, serta untuk membatasi meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi.

2. Untuk mendeskripsikan hambatan implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil apabila dapat memberikan manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau kajian ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji khususnya pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, masukan, dan informasi bagi seluruh *stakeholders* yang terlibat dan masyarakat terkait implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kota Batam dalam rangka penanggulangan pandemi.